

PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA DALAM MELAKUKAN POLITICAL LINKAGE PASCA ELEKTORAL DI PONDOK PESANTREN NURUL IHSAN KREBET BULULAWANG KAB MALANG

George Towar Ikbal Tawakkal

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
george.ikbal@ub.ac.id

Abstrak

Dalam konteks demokrasi, proses politik tidak berhenti pada tahapan elektoral. Tantangan utama pasca pemilu adalah menjaga keterhubungan antara lembaga politik dan masyarakat agar terjalin ekosistem politik yang sehat dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam membangun dan mempertahankan political linkage pasca elektoral di Pondok Pesantren Nurul Ihsan Kabet, Bululawang, Kabupaten Malang. Melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahapan kegiatan meliputi need assessment, pelatihan tentang politik partisipatif, hak politik warga, serta optimalisasi teknologi dalam komunikasi politik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, dalam memperkuat relasi antara lembaga politik dan masyarakat. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam mendorong keberlanjutan komunikasi politik dan membangun kesadaran demokratis di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci:

political linkage; partisipasi politik; penguatan kapasitas

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi untuk menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan negara. Namun, proses demokratisasi tidak berhenti pada pemungutan suara, melainkan menuntut adanya kesinambungan relasi antara lembaga politik dan masyarakat setelahnya. Tantangan pasca pemilu kerap muncul dalam bentuk menurunnya partisipasi masyarakat, lemahnya komunikasi politik, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Kondisi ini dapat menyebabkan apatisisme politik dan polarisasi sosial yang menghambat perkembangan demokrasi yang sehat.

Konsep political linkage menjadi penting dalam menjawab tantangan tersebut. Keterhubungan politik yang baik antara lembaga politik dan masyarakat tidak hanya memperkuat representasi politik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga publik. Dalam konteks lokal, Pondok Pesantren Nurul Ihsan Kabet, Bululawang, sebagai bagian dari masyarakat pendidikan, memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik, khususnya bagi pemilih pemula.

Para siswa yang telah memasuki usia 17 tahun berpotensi menjadi aktor politik baru yang kritis dan partisipatif, namun pada kenyataannya banyak di antara mereka yang belum memahami hak politik dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga pendidikan dalam melakukan political linkage pasca elektoral. Penguatan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang menekankan pentingnya komunikasi politik inklusif, transparansi, serta pemanfaatan media digital. Berdasarkan kajian literatur seperti Dalton (2017), Levitsky & Ziblatt (2018), dan Mounk (2018), penguatan partisipasi politik dan komunikasi publik pasca pemilu merupakan langkah strategis dalam memperkuat demokrasi representatif. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun praktik politik yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini memposisikan mitra, yaitu Pondok Pesantren Nurul Ihsan Kabet, sebagai subjek utama dalam proses pengabdian, sehingga mitra terlibat secara langsung dalam identifikasi permasalahan, perumusan alternatif solusi, serta pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang secara partisipatif. Dengan demikian, seluruh program yang dijalankan diharapkan sesuai dengan kebutuhan nyata dan konteks sosial kelembagaan pesantren.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang difokuskan pada need assessment untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi, kebutuhan, dan permasalahan mitra. Proses asesmen dilakukan melalui wawancara, observasi, serta *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan pengelola pesantren dan pihak terkait. Hasil dari kegiatan ini menjadi dasar dalam penyusunan desain program, perencanaan strategi pelaksanaan, serta pengembangan materi pelatihan yang relevan dan aplikatif sesuai dengan karakteristik mitra.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan simulasi. Materi yang disampaikan mencakup rekognisi politik partisipatif, pemahaman hak politik warga negara, serta pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi politik. Untuk mendukung efektivitas pembelajaran, digunakan berbagai metode seperti ceramah interaktif, diskusi, brainstorming, serta pembelajaran berbasis pemecahan masalah (*problem solving-based learning*). Penerapan metode tersebut bertujuan mendorong partisipasi aktif peserta, meningkatkan kesadaran politik, serta memperkuat kapasitas kelembagaan pesantren dalam menjaga dan membangun keterhubungan yang konstruktif dengan masyarakat.

Tahap akhir kegiatan difokuskan pada evaluasi dan analisis data untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui survei dan observasi guna mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian kegiatan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan publikasi ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Penguatan Kapasitas Lembaga dalam Melakukan Political Linkage Pasca Elektoral di Pondok Pesantren Nurul Ihsan Kribet Bululawang Kabupaten Malang” dilaksanakan sebagai respon terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pasca pemilu dan lemahnya kapasitas lembaga pendidikan dalam menjaga keterhubungan politik antara warga dan institusi politik. Kegiatan ini berfokus pada upaya memperkuat pemahaman dan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengembangkan komunikasi politik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama proses pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan need assessment dan *focus group discussion* (FGD) dengan guru serta siswa Pondok Pesantren Nurul Ihsan untuk memetakan tingkat pemahaman awal terhadap isu partisipasi politik. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memahami politik sebatas proses elektoral dan belum melihat pentingnya keterlibatan warga pasca pemilu. Selain itu, lembaga mitra belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengembangkan kegiatan pendidikan politik secara sistematis. Kondisi ini memperkuat relevansi pelaksanaan pengabdian sebagai sarana peningkatan kapasitas kelembagaan sekaligus penanaman nilai-nilai demokratis sejak dini.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan simulasi, yang meliputi empat materi pokok: (1) rekognisi politik partisipatif, (2) hak politik warga negara, (3) hak akses terhadap dana publik, dan (4) penguatan komunikasi politik berbasis media digital. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi, brainstorming, serta problem-based learning untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Peserta dilatih merancang forum diskusi santri, simulasi musyawarah desa, serta pemetaan masalah warga yang bisa disampaikan kepada aktor politik. Hal ini menjadi langkah awal pesantren sebagai bridging institution dalam linkage pasca elektoral. Hasil observasi menunjukkan antusiasme tinggi dari guru dan siswa, yang tercermin dari keterlibatan lebih dari 85% peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya capaian yang positif dan terukur, baik dari sisi peningkatan pengetahuan maupun dampak sosial. Hasil pre-test menunjukkan 65% peserta belum memahami makna political linkage pasca

elektoral. Pasca pelatihan, 80% peserta mampu menjelaskan konsep dasar dan pentingnya keberlanjutan hubungan politik pasca pemilu.

Tabel 1. Persentasi pre test dan post test

No	Indikator	Persentase
1	Pre - Test	65%
2	Post - Test	80%

Terdapat juga perbandingan yang cukup signifikan diantara pra pelatihan dan pasca pelatihan, yakni sebelum dilaksanakannya pelatihan partisipasi peserta cukup minim, menganggap politik sebagai ranah elit, dan kurangnya pemahaman terhadap relevansi pesantren dalam politik pasca pemilu. Sedangkan, setelah dilaksanakannya pelatihan, partisipasi peserta jauh lebih aktif, peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman baru terkait dasar linkage, dan mulai melihat pesantren sebagai ruang pemberdayaan politik masyarakat.

Tahap evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula dan mendorong perubahan sikap dari pasif menjadi aktif. Guru dan pihak madrasah menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman nilai-nilai demokrasi dan partisipasi warga dalam pengawasan kebijakan publik. Sebagai tindak lanjut, mulai teridentifikasi kelompok kecil santri dan pengurus yang siap menjadi fasilitator literasi politik di lingkungannya, dengan fokus pada partisipasi demokrasi dan advokasi kepentingan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Penguatan Kapasitas Lembaga dalam Melakukan Political Linkage Pasca Elektoral di Pondok Pesantren Nurul Ihsan Kribet Bululawang Kabupaten Malang telah mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan. Melalui pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan partisipatif, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan guru dan siswa sebagai pemilih pemula. Mitra mampu memahami pentingnya peran lembaga pendidikan dalam menjaga keterhubungan antara masyarakat dan lembaga politik setelah pemilu berlangsung.

Kegiatan ini menghasilkan perubahan nyata berupa terbentuknya forum siswa sebagai wadah pembelajaran politik di lingkungan madrasah dan meningkatnya kapasitas guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, kegiatan ini mendorong munculnya sikap kritis, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap proses politik di sekitar peserta.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pelibatan langsung masyarakat pendidikan dalam proses pembelajaran politik berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi politik dan partisipasi pasca elektoral. Program ini dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lain dalam mengembangkan pendidikan politik berbasis partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Carothers, T., & Youngs, R. (2015). *The Complexities of Global Democracy*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Dalton, R. J. (2017). *The Participation Gap: Social Status and Political Inequality*. Oxford University Press.
- Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2020). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (Pra). *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing.
- Mounk, Y. (2018). *The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It*. Harvard University Press.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Suseno, Nuri. (2013). *Representasi Politik : Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok : Puskapol FISIP UI
- Wahl, F. (2019). Political participation and economic development. Evidence from the rise of participative political institutions in the late medieval German Lands. In *European Review of Economic History*. <https://doi.org/10.1093/ereh/hey009>
- Or, M. H., & Berkovich, I. (2021). Participative decision making in schools in individualist and collectivist cultures: The micro-politics behind distributed leadership. *Educational Management Administration and Leadership*. <https://doi.org/10.1177/17411432211001364>